

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MASAGO KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

Noviana^{1*}, Ashari Mone², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the role of the village head in the management of Masago village-owned enterprises and also the supporting and inhibit factor for the role of the village head in managing BUMDes. This study used qualitative research. Sources of data used primary data and secondary data. The data collection methods used observation, interview and dokumentation methods. The technique of analysing data through three stages, namely the stage of data education, data display and data verification. The results of the study showed that the role of the village head in managing BUMDes Mangngiri was seen from three indicators, namely interpersonal roles, roles related to information and decision making roles. In this case, the village head played a sufficient role in the establishment and planning of business units, but it was the village head was still not maximal in monitoring and advising the performance of BUMDesa, the village head of Masago had not fully played a role in managing Bumdes Mangngiri.

Keywords: *role, village head, management, bumdes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masago dan juga faktor pendukung dan penghambat peran kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tiga tahapan yakni tahap redukasi data, penyajian data (*data display*) dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri dilihat dari tiga indikator yaitu peran antar pribadi, peran yang berhubungan dengan informasi, peran mengambil keputusan. Dalam hal ini Kepala Desa cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi hanya saja peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Kepala Desa Masago belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri.

Kata kunci: peran, kepala desa, pengelolaan, bumdes

* noviana@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era lebih luas. Otonomi memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih startegi, berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hal tersebut akan mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Desa merupakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), sebagian pelaksanaan pemerintah Negara yang paling bawah dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa

pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemeritah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraanya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efesiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Bentuk BUMDes dengan demikian, dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia. Bentuk yang beragam ini sesuai dengan masing-masing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran

kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah pengelolaan BUMDesa dinyatakan oleh pengurus BUMDes bahwasanya Badan Usaha Milik Desa MANGNGIRI Desa Masago pengelolaannya kurang maksimal. Pengurus BUMDes mengatakan “pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masago selama ± 1 tahun ini memang mengalami kemacetan karena berbagai kendala yang dihadapi dan unit usaha yang dikembangkan juga kurang berjalan”. Adapun masalah yang terjadi seperti: kurangnya pembinaan dari kepala desa sehingga banyak program yang macet, adapun program yang macet yaitu program SPP (Simpan Pinjam) karena adanya masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman yang diberikan sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah diberikan yang seharusnya masyarakat diberikan suatu pencerahan tentang program itu oleh kepala desa dan pengurus bumdesa. Macetnya program penyewaan karoke

yang diakibatkan oleh banyaknya alat-alat yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, seharusnya dalam hal ini kepala desa sangat berperan sebagai pemimpin untuk mengatur dan mencari jalan keluar tentang hal ini, bukan malah diam saja tanpa adanya pergerakan. Tidak berjalan lancarnya program penyewaan molen, mesin jahit dan pemotongan padi dikarenakan jenis usaha itu banyak saingan dan masyarakat lebih memilih ditempat lain dan juga sebagian besar masyarakat di desa tersebut memiliki alat itu sehingga mereka tidak perlu menyewa lagi, dalam hal ini kepala desa sebagai pemimpin desa memberikan inovasi baru kepada pengurus bumdesa terkait apa program yang bagus untuk dilaksanakan sehingga mencapai keberhasilan dalam pengelolaan bumdesa.

Peran yaitu aspek dinamis dalam kedudukan terhadap suatu. Apabila ada orang yg melakukan hak dan kewajibannya sesuai apa kedudukannya, jadi ia menjalankan perannya. Teori yang sangat mendukung penelitian ini yaitu *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Mintzberg (Siswanto dan Miftha Thoha 2012) yang mengemukakan peran pemerintah yaitu sebagai : (a) Peran antar pribadi (Interpersonal role), dalam peranan ini antar pribadi ini, atasan/pimpinan harus bertindak sebagai

toko, pemimpin dan penghubung supaya organisasi yang dikelolanya berjalan lancar. Peranan ini oleh Mitzberg dibagi atas tiga peranan. Tiga peranan ini dijelaskan sbb: (1) Peranan sebagai tokoh, yakni suatu peranan dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpin untuk setiap kesepakatan dan persoalan yang timbul secara formal. (2) Peranan sebagai pemimpin, dalam peranan ini atasan sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal bersama yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. (3) Peranan sebagai pejabat perantara, di sini atasan melakukan peranannya yang berinteraksi dengan teman, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi. (b) Peranan yang berhubungan dengan informasi, seperti peranan interpersonal di atas meletakkan pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi. Peranan interpersonal di atas Mintzberg rancang peranan kedua seperti yang berhubungan dengan informasi yang ada. (c) Peranan pengambil keputusan, dalam peranan di sini atasan wajib terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di organisasi yang dipimpinnya. Mitzberg memberikan kesimpulan bahwa pembagian tugas

atasan pada hakikatnya digunakan dengan penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi pada organisasinya.

Teori Peran menekankan sifat individu sebagai pelaku utama sosial yang mempelajari perilaku sesuai apa posisi/jabatan yang ditempati nya di lingkungan kerja dan masyarakat. Adapun Teori Peranan mencoba juga untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, seperti fokus pada peran yang dimainkan. Peran adalah hak, kewajiban, harapan, norma serta perilaku orang dalam menghadapi dan memenuhi perannya itu. Adapun model berdasarkan pada pengamatan bahwasannya orang yang berperilaku dengan caranya dapat diprediksi, dan juga perilaku dalam konteks tertentu, berdasar pada posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah lingkungan pada organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu perilaku seseorang sesuai dengan status serta kedudukan di masyarakat.

Peran menurut Komarudin (1994) merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Peranan merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok

termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Samual Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu : (a) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara. (b) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli, maka yang di maksud pengelolaan pada

penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul "Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: "Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk

memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (a) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (b) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. (c) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan peneliti harus terjun kelapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, kemudian cara pengumpulan data tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dihadapi

individu, mengungkap dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan, dan mengkontruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi sehingga diharapkan data yang didapatkan akan lebih maksimal. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data digunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Masago telah membuat peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan

kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Masago.

Badan Usaha Milik Desa Mangngiri merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar di Desa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MANGNGIRI terletak di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Badan usaha milik desa berdiri pada tanggal 24 April 2016. Badan usaha milik desa Mangngiri ini

berdiri berdasarkan prakarsa pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di Desa Maasago. Selain untuk mengelola potensi Desa yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, banyak potensi Desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa Masago mendirikan BUMDes MANGNGIRI untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi-potensi tersebut.

Terdapat tiga indikator untuk melihat peran kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes Menurut Mintzberg (Siswanto dan Miftha Thoha 2012) yaitu: (1) peran antar pribadi (2) peran yang berhubungan dengan informasi (3) peran mengambil keputusan.

Peran Antar Pribadi

Gambaran yang dapat dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas pemimpin, dan hal-hal yang berhubungan dengan antar pribadi. Pemimpin dalam hal ini harus menjalankan perannya seperti mengikuti kegiatan seremonial, dan kegiatan yang berbau dengan orang banyak atau warga agar dapat membangun hubungan yang

erat dengan masyarakat. Dalam penelitian ini dimana pemimpin yang dimaksudkan adalah kepala Desa.

Dari beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa sebagai peran antar pribadi belum terlaksana dengan baik, dimana kurangnya interaksi ataupun sosialisasi antara kepala desa dengan warga dan pengurus Bumdes dilihat dari keluhan keluhan dari masyarakat terkait kinerja dari Kepala desa itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh informan pada penelitian ini bahwasannya kepala desa kurang melakukan sosialisasi terkait program yang telah direncanakan sehingga banyak masyarakat yang kurang paham. Seharusnya adakan kegiatan seperti kegiatan pelayanan keliling, jadi pengurus Bumdes mendatangi langsung masyarakat yang berpengaruh dan menjelaskan tentang programnya.

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kab.Bone tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mintzberg (Miftha Thoha) dimana Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDesa adalah atasan/pimpinan harus bertindak sebagai toko, pemimpin dan penghubung supaya organisasi yang dikelolanya berjalan lancar. Namun dari hasil observasi dan

wawancara dengan beberapa informan ternyata peran Kepala Desa tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Mintzberg, hal ini dapat dilihat dari masih adanya keluhan dari pengurus Bumdes dan masyarakat desa masago dilihat dari kurangnya sosialisasi antara kepala desa dengan pengurus bumdes, dan tidak adanya peran kepala Desa sebagai tokoh dan pemimpin dalam hal mengelola bumdes, ini dapat dilihat dari tidak adanya upaya kepala Desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes yang ada.

Peran Yang Berhubungan Dengan Informasi

Pemimpin harus berperan sebagai pencari, penerima, dan pengumpul informasi. Dimana pemimpin melakukan hubungan-hubungan luar untuk mendapatkan informasi, kemudian dibagikan kepada anggotanya. Dari hasil penelitian peneliti mengetahui bahwa masih sangat kurang informasi terkait dengan pengembangan Bumdes, dimana hal tersebut dapat dilihat dari program kerja Bumdes yang tidak dijalankan atau dengan kata lain macet. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai peran yang berhubungan dengan informasi belum terlaksana dengan baik.

Sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan akan kreatifitas ataupun usaha-usaha yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan Bumdes seiring dengan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan warga. Maka dari itu peran kepala desa dalam memberikan dan menerima informasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan Bumdes di Desa Masago.

Peran Kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mintzberg (Miftha Thoha) dimana Peran yang berhubungan dengan informasi yaitu peran kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai pemantau, sebagai diseminator dan juru bicara. Dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan ternyata peran kepala desa tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mintzberg, hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat dan pengurus bumdes tentang kurangnya informasi terkait dengan pengembangan Bumdes, dan kegiatan pelatihan bumdes sehingga mengakibatkan kurangnya kreatifitas ataupun usaha yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan bumdes. Kepala desa juga jarang sebagai juru bicara apabila ada kegiatan bumdes,

ini karena kepala desa jarang hadir dalam kegiatan bumdes.

Peran Dalam Mengambil Keputusan

Pemimpin atau kepala Desa selayaknya memiliki jiwa kewirausahaan (interpreneur) dalam rangka mengembangkan Bumdes serta berani mengambil keputusan dalam agar dapat menunjang kemajuan Bumdes. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam mengambil keputusan tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang tidak terlaksana disebabkan karena kendala dalam perizinan.

Sebagai pemimpin yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dalam hal ini adalah kepala Desa seharusnya dapat mengambil keputusan yang dapat menunjang perkembangan Bumdes dan kemajuan Bumdes, tidak hanya dalam mengambil keputusan tetapi juga dalam menampung masukan dan aspirasi dari warga ataupun pengurus Bumdes.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masago. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa di desa Masago Kecamatan Patimpeng

Kabupaten Bone tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mintzberg (Miftha Thoha) dimana peran dalam mengambil keputusan yaitu kepala desa wajib terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di organisasi yang dipinpinnya. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peran kepala desa dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan mitzberg. Ini dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang tidak terlaksana disebabkan karena kendala dalam perizinan dan kurang tegasnya kepala desa kepada pengurus bumdes, disini berarti strategi yang digunakan kepala desa tidak maksimal sehingga program kerjanya banyak yang macet. Sebagai pemimpin yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dalam hal ini adalah kepala Desa seharusnya dapat mengambil keputusan yang dapat menunjang perkembangan Bumdes dan kemajuan Bumdes, tidak hanya dalam mengambil keputusan tetapi juga dalam menampung masukan dan aspirasi dari warga ataupun pengurus Bumdes.

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mendukung dan menghambat peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa yaitu : Faktor internal yang mendukung yaitu: (a) Semua aparat desa menyambut Bumdes dengan baik, hal ini dapat dilihat dari

keikutsertaan aparat desa dalam pendirian dan kegiatan bumdes. (b) Adadukungan dari semua elemen yang adadipemerintahan desa Masago, karena dengan adanya Bumdes di Desa Masago dapat membantu masyarakat Desa Masago untuk meningkatkan perekonomiannya, untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta sebagai wadah untuk menyalurkan kreatifitas warga. (c) Adanya kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD dalam pengelolaan Bumdes merupakan suatu hal untuk membuat Desa Masago semakin maju dan berkembang khususnya dibidang ekonomi melalui usaha usaha Bumdes yang dikelola.

Faktor internal yang menghambat yaitu Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan Bumdes. Didalam pengelolaan suatu lembaga, pengetahuan tentang usaha usaha yang ada dilembaga itu merupakan unsur pokok dan sangat penting bagi pengelolaan suatu usaha. Akan tetapi yang terjadi pada pengelolaan Bumdes Mangngiri Desa Masago ini masih kurangnya kualitas SDM yang ada ditinjau dari segi pendidikan maupun pemahaman terhadap pengelolaan itu sendiri.

Pemerintah Desa Masago dan BPD pada prinsipnya sangat mendukung penuh dengan adanya Bumdes di Desa Masago untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun karena kurangnya pemahaman, sehingga bumdes mangngiri belumbegitu berkembang secara signifikan tetapi dampak positifnya sudah bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Masago.

Faktor eksternal yang mendukung yaitu: (a) Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan Patimpeng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sangat mendukung Kepala Desa Masago dalam pengelolaan Bumdes, karena Bumdes merupakan suatu wadah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan adalah pelatihan atau bimbingan bagi pemerintah desa bersama pengelola bumdes untuk meningkatkan pengetahuannya. (b) Adadukungan dari masyarakat Desa Masago. Masyarakat sangat mendukung kepala desa dalam mengembangkan Bumdes di Desa Masago, karena dengan adanya bumdes perekonomian masyarakat bisa meningkat dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Faktor eksternal yang menghambat yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Bumdes sehingga ada perbedaan pendapat kepala desa dengan masyarakat. Dalam pengelolaan bumdes Mangngiri pemahaman masyarakat terhadap Bumdes masih rendah, sehingga dalam pengelolaan mengalami hambatan, namun namun ketidakpahaman masyarakat bukan suatu hambatan bagi kepala desa dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi desa melalui Bumdes. Dalam pengelolaan Bumdes Mangngiri, dukungan dari Kecamatan untuk Desa Masago sangat baik guna mendukung dan membangun perekonomian masyarakat, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Masago tentang Bumdes jadi dalam pengelolaannya mengalami sedikit kendala, tapi bukan berarti kendala itu menjadi penghalang dalam mengelola Bumdes untuk berhenti. Kendala itu dijadikan pelajaran untuk semakin maju dalam berpikir maupun bertindak untuk mencapai tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Masago.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa Masago dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri sudah berperan dari sisi pendirian maupun

perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Mangngiri telah berdiri ±4 tahun dan belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Masago.

Faktor yang mendukung peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Bumdes yaitu Faktor Internal yang terdiri dari, semua aparat desa menyambut bumdes dengan baik, ada dukungan dari elemen yang ada di pemerintahan desa serta kerjasama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dan faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan Patimpeng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Faktor yang menghambat peran kepala Desa Dalam Pengelolaan Bumdes yaitu faktor Internal : rendahnya pemahaman perangkat Desa terhadap pengelolaan Bumdes dan faktor Eksternal yaitu Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bumdes sehingga ada perbedaan pendapat Kepala Desa dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggar Sekar Manikum, *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Yogyakarta : 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Fajarsari, Yeni. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*, Skripsi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.
- Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2017.
- Ibrahim & Tanjung, S.I. (2018), *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat*, *Jurnal Tata Loka*, 20, (3), 309-316
- Ihsan, N.A (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, *Journal Of Politic and Government Studies*, 7, (4), 221-230.
- Kemendes. 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Liow, H., Lengkong F.D.J. & Novie, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawankonan. AP: *Jurnal Administrasi Publik* 4, (61)
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Purnamasari, Hanny. Yulyana, Eka. Ramdani, Rachmat. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 1 No. 2. e-ISSN : 2528 – 2069.
- Rufaidah, Aslamiah. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggun Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.